

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Surabaya (Studi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo) dengan menggunakan model implementasi Soren C. Winter, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi cukup mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya. Hal ini terlihat dari berbagai wujud komitmen dan koordinasi antar organisasi yang terlibat, seperti hadirnya staf pendamping UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, penyediaan formulir pendataan usaha, penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan dan pemasaran usaha, pemberian informasi kemitraan dan bantuan mengurus legalitas izin usaha, serta penggunaan grup whatsapp maupun pengadaaan pertemuan rutin bulanan. Namun, terdapat faktor penghambat perilaku hubungan antar organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat (pelaku usaha) tentang pentingnya kebijakan tersebut.
2. Perilaku Birokrasi Tingkat Bawah cukup mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya. Hal ini terlihat dari adanya kontrol organisasi, etos kerja, dan norma-norma profesionalisme seperti pengarahan, koordinasi, dan pendelegasian yang jelas terkait wewenang, tugas, fungsi,

serta tanggung jawab para pegawai, pengadaan pertemuan rutin maupun rapat evaluasi, serta keterbukaan komunikasi. Namun, terdapat faktor penghambat perilaku birokrasi tingkat bawah dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, yaitu kurangnya pemahaman atas informasi yang diterima secara *internal* dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM).

3. Perilaku Kelompok Sasaran cukup mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya. Hal ini terlihat dari keberagaman respon Kelompok UMKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelompok UMKM seluruh kelurahan setempat, ada sebagian yang memberikan respon positif dan sebagian lainnya menanggapi dengan respon negatif ketika mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Maka dari itu, faktor penghambat perilaku kelompok sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat (pelaku usaha) atas pentingnya kebijakan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah, Kelompok UMKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo, beserta Kelompok UMKM seluruh kelurahan setempat perlu menjalin kerjasama dengan ketua RT/RW termasuk karang taruna untuk dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi atau edukasi secara langsung tentang pentingnya mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro

kepada warga maupun pelaku usaha. Dan, perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah setempat dengan Kelompok UMKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelompok UMKM seluruh kelurahan dalam memberikan pelatihan motivasi, *sharing session*, serta studi banding secara berkala bagi para pelaku usaha mikro setempat.

2. Pihak Kelompok UMKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo beserta Kelompok UMKM seluruh kelurahan setempat juga harus bekerja sama membuat informasi profil UMKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang komprehensif, mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai penyebaran informasi maupun pemasaran, dan secara berkala dapat menjalin kerjasama dengan Ketua RT/RW termasuk karang taruna dalam mengadakan kegiatan seperti pameran atau festival produk usaha mikro dilengkapi dengan layanan legalitas izin usaha, serta *business matching* (temu bisnis) bagi pelaku usaha mikro dengan mitra usaha besar di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.
3. Pihak pemerintah baik Dinkopumdag Kota Surabaya dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo perlu meningkatkan komunikasi yang efektif antar pegawai dan unit kerja seperti pengadaan rapat rutin hingga penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Dan, pihak pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat atau kelompok UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo untuk turut serta mengawasi aktivitas para pegawainya dengan cara memberikan umpan balik mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro setempat.